

PARADOKS EFEKTIVITAS BELANJA MODAL TERHADAP PDRB PER KAPITA: KEMISKINAN, IPM, DAN FISCAL SOCIAL DECOUPLING DI PROVINSI JAMBI

The Paradox of Capital Expenditure Effectiveness on GRDP Per Capita: Poverty, HDI, and Fiscal-social decoupling in Jambi Province

Nurfitri Martaliah¹, Isma Wati², Muhammad Ismail³, Asti Harken⁴

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16
Simpang Sungai Duren, Kab. Muaro Jambi 36124
Nmartaliah@uinjambi.ac.id¹, isma30751@gmail.com², drs.muhammadismail232@gmail.com³,
astiharken⁴77@gmail.com⁴

Diterima: 15 Mei 2026; Direvisi: 29 Juli 2026; Disetujui: 12 Agustus 2026.

DOI: <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.445>

Abstract

This study aims to examine the effect of capital expenditure, poverty, and the Human Development Index (HDI) on GRDP per capita across 11 regencies/municipalities in Jambi Province during 2017–2024. Secondary panel data (88 observations) from Statistics Indonesia (BPS) Jambi Province and the Directorate General of Fiscal Balance were analyzed using panel data regression, with model selection through the Chow and Hausman tests. The tests establish the Fixed Effect Model (FEM) as the best model (Chow: Prob. Cross-section Chi-square = 0.0000; Hausman: Prob. Cross-section random = 0.0474). Simultaneously, capital expenditure, poverty, and HDI significantly affect GRDP per capita (Prob. F-statistic = 0.000000), with high explanatory power ($R^2 = 0.703572$; Adjusted $R^2 = 0.615086$). Partially, however, none of the three variables is statistically significant (Prob. t of 0.9353, 0.7573, and 0.6815, respectively), with capital expenditure and poverty showing negative coefficients and HDI a positive one. This pattern suggests that the model's high explanatory power is driven largely by cross-sectional fixed effect time-invariant structural characteristics of each regency/municipality rather than by the annual dynamics of the three policy variables themselves. These findings are interpreted through the lens of Fiscal-social decoupling: a disconnection between annual fiscal-social instruments and regional economic outcomes, in light of Jambi's economic structure, which remains dominated by primary and commodity-based sectors. The novelty of this study lies in operationalizing decoupling through the pattern of partial insignificance amid a strong joint model, read as policy evidence of the dominance of regional structural factors rather than mere model failure. The article recommends shifting capital expenditure from an input-based to an outcome-based approach, strengthening productive infrastructure linked to leading sectors, integrating poverty-reduction and HDI programs with regional economic strategy, and using economic-benefit indicators in local budget evaluation. These findings should be read within the limitations of a model that has not yet incorporated structural variables, private investment, commodity prices, or lagged capital expenditure.

Keywords: Capital Expenditure, Poverty, HDI, GRDP Per Capita, Fiscal-social decoupling, Panel Data

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja modal, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap PDRB per kapita pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2017–2024. Data sekunder berbentuk data panel (88 observasi) bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dianalisis dengan regresi data panel melalui uji Chow dan uji Hausman untuk pemilihan model. Hasil pengujian menetapkan *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model terbaik (Chow: Prob. *Cross-section Chi-square* = 0,0000; Hausman: Prob. *Cross section random* = 0,0474). Secara simultan, belanja modal, kemiskinan, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita (Prob. F-statistic = 0,000000) dengan daya jelaskan model yang tinggi (*R-squared* = 0,703572; *Adjusted R-squared* = 0,615086). Namun secara parsial, ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan (Prob. t masing-masing 0,9353; 0,7573; dan 0,6815), sementara arah koefisien belanja modal dan kemiskinan negatif dan IPM positif. Pola ini menunjukkan bahwa daya jelaskan model yang tinggi lebih banyak disumbang oleh efek tetap antarwilayah (karakteristik struktural kabupaten/kota yang bersifat tetap dari waktu ke waktu) dibandingkan oleh dinamika tahunan ketiga variabel kebijakan itu sendiri. Temuan ini dibaca melalui kerangka *Fiscal social decoupling*, yaitu keterputusan antara instrumen fiskal-sosial tahunan dan capaian ekonomi daerah, dengan mempertimbangkan struktur ekonomi Jambi yang masih didominasi sektor primer dan komoditas. Kebaruan penelitian terletak pada operasionalisasi *decoupling* melalui pola ketidaksignifikan parsial di tengah model simultan yang kuat, serta pembacaan hasil tersebut sebagai temuan kebijakan mengenai dominasi faktor struktural wilayah, bukan sekadar kegagalan model. Artikel ini merekomendasikan reorientasi belanja modal dari basis input menuju basis *outcome*, penguatan infrastruktur produktif yang terhubung dengan sektor unggulan, integrasi program kemiskinan dan IPM dengan strategi ekonomi wilayah, serta penggunaan indikator manfaat ekonomi dalam evaluasi APBD. Temuan ini perlu dibaca dalam keterbatasan model yang belum memasukkan variabel struktural, investasi swasta, harga komoditas, dan lag belanja modal.

Kata Kunci: *Belanja Modal, Kemiskinan, IPM, PDRB Per Kapita, Fiscal social decoupling, Data Panel*

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal memberi ruang besar kepada pemerintah daerah untuk menentukan prioritas belanja pembangunan, dan belanja modal menempati posisi strategis karena diarahkan untuk membiayai aset tetap, infrastruktur dasar, dan fasilitas publik. Persoalannya, realisasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi terus berjalan dari tahun ke tahun, tetapi kenaikan tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan PDRB per kapita yang sepadan. Kesenjangan antara input fiskal dan *outcome* ekonomi inilah yang menjadi persoalan utama yang mendorong penelitian ini, bukan sekadar pertanyaan apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan, melainkan mengapa pengaruh tersebut kerap tidak terlihat pada level kabupaten/kota.

Provinsi Jambi merupakan konteks yang relevan untuk membaca persoalan tersebut karena struktur ekonominya masih bertumpu pada sektor primer dan komoditas. Data BPS Provinsi Jambi menunjukkan bahwa perekonomian provinsi ini masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 33,35 persen terhadap PDRB, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran (13,45 persen) serta Pertambangan dan Penggalian (13,14 persen) (Badan Pusat Statistik

Provinsi Jambi, 2024). Delapan dari sebelas kabupaten/kota bahkan mencatat sektor pertanian sebagai kontribusi PDRB paling dominan. Dari sisi eksternal, sektor pertambangan menyumbang 59,82 persen dari total ekspor Provinsi Jambi pada 2023, sementara komoditas olahan sawit dan karet menyumbang 36,79 persen ekspor sektor industri (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024). Karakter ekonomi berbasis komoditas semacam ini membuat PDRB per kapita kemungkinan besar lebih responsif terhadap harga komoditas global, produksi sektor primer, dan investasi swasta ketimbang terhadap *realisasi* belanja modal pemerintah daerah semata. Struktur inilah bukan sekadar latar geografis yang menjadi dasar argumentasi mengapa efektivitas belanja modal di Jambi patut dipertanyakan secara empiris.

Sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan belanja modal, kemiskinan, dan IPM dalam model pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDRB, umumnya dengan hasil yang beragam. Amri dkk. (2025) menemukan bahwa belanja modal dan IPM berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita pada data panel kabupaten/kota di Aceh, sementara Umsahy dkk. (2018) mendapati bahwa alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun dengan kekuatan penjelasan yang terbatas terhadap kemiskinan di Maluku Utara. Sebaliknya, Ihwandi dkk. (2023) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tidak selalu berbanding lurus dengan pembangunan ekonomi inklusif di level provinsi, dan Tirtosuharto (2021) mencatat bahwa efisiensi fiskal terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia sangat bergantung pada faktor kelembagaan dan perbedaan geografis. Pada isu keterkaitan desentralisasi fiskal, pembangunan manusia, dan pertumbuhan wilayah, Sofilda dkk. (2023) menemukan hubungan yang signifikan pada level kabupaten/kota se-Indonesia, sedangkan Siburian (2020) justru menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat memperbesar ketimpangan pendapatan antar wilayah. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa studi-studi tersebut umumnya masih menguji hubungan linier antar variabel fiskal sosial ekonomi secara terpisah, dan belum banyak yang secara eksplisit membingkai hasil tidak signifikan sebagai indikasi keterputusan sistemik antara kebijakan fiskal, indikator sosial, dan struktur ekonomi berbasis komoditas seperti di Provinsi Jambi.

Celah kebaruan penelitian ini terletak pada penguatan dua konsep yang saling berkaitan sejak awal: paradoks efektivitas belanja modal dan *Fiscal social decoupling*. Paradoks efektivitas belanja modal merujuk pada kondisi ketika realisasi belanja pembangunan belum mampu menghasilkan kenaikan PDRB per kapita secara terukur, sedangkan *Fiscal social decoupling* menjelaskan keterputusan antara input fiskal,

perbaikan indikator sosial, dan *outcome* ekonomi daerah. Kedua konsep ini bukan istilah yang muncul untuk menjelaskan hasil regresi tidak signifikan setelah estimasi dilakukan, melainkan kerangka baca yang dibangun sejak awal dari kondisi struktural Jambi: ketika perekonomian daerah lebih banyak ditentukan oleh faktor eksogen berbasis komoditas, maka secara teoritis wajar apabila belanja modal, kemiskinan, dan IPM yang bekerja melalui jalur produktivitas domestik menunjukkan keterkaitan yang lemah dengan PDRB per kapita. Landasan teoritis atas argumen ini diuraikan lebih lanjut pada bagian Landasan Teori.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja modal, kemiskinan, dan IPM terhadap PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2017–2024, sekaligus menguji apakah pola hasil yang diperoleh konsisten dengan gagasan *Fiscal social decoupling*. Kontribusi utama penelitian bukan hanya pada hasil *regresi*, tetapi pada penafsiran kebijakan atas hasil tersebut: jika variabel fiskal dan sosial tidak signifikan, pemerintah daerah perlu meninjau ulang desain belanja modal, basis sektor ekonomi, dan indikator *outcome* yang digunakan dalam evaluasi APBD.

Tabel 1. Posisi Kebaruan Penelitian

Aspek Kebaruan	Penjelasan	Kontribusi	Bukti/Rujukan Pendukung
Paradoks efektivitas belanja modal	Belanja modal dipahami sebagai instrumen kebijakan yang efektivitasnya bergantung pada kualitas dan keterhubungan sektor, bukan hanya nominal pengeluaran.	Menilai apakah belanja pembangunan benar-benar menciptakan <i>outcome</i> ekonomi.	Konsisten dengan Oates (1972) tentang syarat kapasitas dan tata kelola dalam <i>desentralisasi fiskal</i> ; sejalan dengan temuan Ihwandi dkk. (2023) bahwa kinerja keuangan daerah tidak otomatis berbanding lurus dengan <i>outcome</i> ekonomi.
<i>Fiscal social decoupling</i>	Kondisi ketika belanja modal, kemiskinan, dan IPM belum terhubung dengan PDRB per kapita.	Hasil tidak signifikan dibaca sebagai temuan kebijakan, bukan sekadar kegagalan statistik.	Dioperasionalkan melalui empat indikator minimum pada subbagian Hasil dan Pembahasan (lihat “Makna <i>Operasional Fiscal social decoupling</i> ”); berbeda dari Sofilda dkk. (2023) yang menemukan hubungan signifikan pada konteks nasional.
Konteks ekonomi Jambi	Jambi memiliki karakter sektor <i>primer</i> dan komoditas yang kuat (agregat pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan	Menjelaskan mengapa PDRB per kapita dapat lebih dipengaruhi faktor <i>struktural</i> daripada belanja modal tahunan.	Data struktur PDRB dan ekspor BPS Provinsi Jambi (2024); sejalan dengan Tirtosuharto (2021) mengenai peran faktor geografis-struktural

	berbasis komoditas).		dalam <i>efektivitas fiskal</i> .
Implikasi kebijakan	Fokus pada kualitas belanja, infrastruktur produktif, dan integrasi program sosial ekonomi.	Memberi rekomendasi operasional bagi pemerintah daerah.	Dielaborasi pada Tabel 6 dengan indikator evaluasi berbasis <i>outcome</i> .

Sumber: Diolah penulis, 2026

LANDASAN TEORI

Belanja Modal, Investasi Publik, dan Pertumbuhan Daerah

Teori Harrod-Domar memandang investasi sebagai motor pertumbuhan karena akumulasi modal memperbesar kapasitas produksi (Harrod, 1939). Dalam konteks pemerintah daerah, belanja modal dapat diposisikan sebagai investasi publik yang memperluas infrastruktur, memperbaiki pelayanan dasar, dan mengurangi hambatan aktivitas ekonomi. Teori Solow kemudian menekankan bahwa akumulasi modal fisik saja tidak cukup; pertumbuhan jangka panjang membutuhkan produktivitas dan kemajuan teknologi (Solow, 1956). Implikasinya, belanja modal hanya akan berdampak kuat terhadap PDRB per kapita apabila infrastruktur yang dibangun mampu meningkatkan produktivitas dan terkoneksi dengan kegiatan ekonomi bernilai tambah bukan sekadar pembangunan fisik administratif.

Teori desentralisasi fiskal menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih efisien dalam menyediakan barang publik karena memiliki informasi yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal (Oates, 1972). Akan tetapi, efektivitas tersebut bergantung pada kapasitas perencanaan, kualitas tata kelola, dan kemampuan memilih proyek yang produktif. Ketika kapasitas kelembagaan daerah terbatas, belanja modal berisiko terjebak pada logika penyerapan anggaran dan gagal tersambung dengan rantai nilai lokal fenomena yang dalam literatur Desentralisasi fiskal dikenal sebagai kegagalan transmisi kebijakan (*policy transmission failure*) dan inefisiensi birokrasi pada ekonomi berbasis sumber daya alam. Argumen inilah yang menjadi dasar bagi konsep *fiscal social decoupling*: pada wilayah dengan struktur ekonomi bertumpu komoditas seperti Jambi, belanja modal secara teoretis dapat “*decoupled*” dari produktivitas domestik karena *outcome* ekonomi lebih banyak ditentukan oleh harga dan volume komoditas primer daripada oleh input fiskal tahunan. Dengan demikian, hasil regresi yang tidak signifikan pada bagian Hasil dan Pembahasan bukan semata konsekuensi teknis, melainkan dapat dibaca sebagai konsistensi empiris atas argumen teoritis ini. Karena itu, dalam penelitian ini belanja modal dipahami sebagai instrumen efektivitas fiskal yang hipotesis pengaruhnya diuji secara langsung pada H_1 , bukan sekadar realisasi anggaran.

Kemiskinan, IPM, dan Kapasitas Sosial Ekonomi

Kemiskinan menunjukkan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses peluang ekonomi. Dalam teori lingkaran kemiskinan, rendahnya pendapatan mengakibatkan rendahnya tabungan, rendahnya investasi, dan rendahnya produktivitas, sehingga kemiskinan menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi (Nurkse, 1953). Secara mekanistik, kemiskinan yang tinggi menekan daya beli rumah tangga dan memperlemah efek pengganda (*multiplier*) belanja pembangunan terhadap perekonomian lokal, sehingga pada H_2 kemiskinan dihipotesiskan berpengaruh negatif terhadap PDRB per kapita.

IPM merepresentasikan kualitas pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pendekatan kapabilitas Sen memandang pembangunan sebagai perluasan kemampuan manusia, bukan sekadar peningkatan *output* (Sen, 1999). Secara teoretis, IPM yang lebih tinggi meningkatkan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja (H_3 : berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita). Namun demikian, mekanisme ini bersyarat: peningkatan pendidikan dan kesehatan baru terkonversi menjadi produktivitas ekonomi apabila tersedia pasar kerja yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik. Tanpa pasar kerja produktif, kenaikan IPM dapat berjalan sendiri, terlepas dari peningkatan output daerah kondisi yang dalam literatur sering disebut sebagai jeda (*lag*) antara investasi *human capital* dan realisasi ekonominya, karena akumulasi kapabilitas manusia membutuhkan waktu lebih dari satu periode tahunan untuk terkonversi menjadi nilai tambah ekonomi.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Penelitian ini menempatkan PDRB per kapita sebagai *outcome* ekonomi daerah, belanja modal sebagai input fiskal, kemiskinan sebagai indikator kerentanan sosial ekonomi, dan IPM sebagai indikator kualitas manusia. Hipotesis H_1 – H_3 dibangun berdasarkan teori konvensional di atas (Harrod-Domar, Solow, Oates, teori lingkaran kemiskinan, dan pendekatan kapabilitas Sen), yang secara umum memprediksi hubungan langsung antara ketiga variabel independen dan PDRB per kapita. *Fiscal social decoupling*, sebaliknya, tidak diposisikan sebagai hipotesis kelima yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kerangka interpretasi yang digunakan apabila H_1 – H_3 tidak terdukung secara empiris: ketidaksignifikanan tersebut dibaca melalui argumen struktural pada sub bab sebelumnya, bukan sebagai anomali statistik semata.

Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: H_1 , belanja modal berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita; H_2 , tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap PDRB per kapita; H_3 , IPM berpengaruh positif terhadap PDRB per

kapita; dan H₄, belanja modal, kemiskinan, dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap PDRB per kapita. Hipotesis ini diuji dengan regresi data panel pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama 2017–2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Data panel dipilih karena mampu menggabungkan variasi antar wilayah dan antar waktu, sehingga lebih sesuai untuk menganalisis 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2017–2024 (88 observasi). Periode 2017–2024 dipilih dengan dua pertimbangan: pertama, rentang ini mencakup periode sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19 sehingga dapat menangkap dinamika belanja modal dan PDRB per kapita secara utuh, termasuk periode pemulihan fiskal daerah; kedua, rentang delapan tahun dianggap cukup untuk membentuk struktur data panel yang memadai pada 11 kabupaten/kota tanpa terpengaruh perubahan definisi variabel BPS yang cukup besar.

Tahun 2020–2021 (periode pandemi COVID-19) dimasukkan dalam data panel apa adanya, tanpa *variabel dummy* atau perlakuan statistik khusus, sehingga estimasi *Fixed Effect Model* pada penelitian ini menangkap dinamika PDRB per kapita, belanja modal, kemiskinan, dan IPM sebagaimana adanya sepanjang periode observasi, termasuk fluktuasi akibat pandemi.

Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi untuk PDRB per kapita, kemiskinan, dan IPM, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk realisasi belanja modal. Variabel dependen penelitian adalah PDRB per kapita, dan variabel independen terdiri atas belanja modal, tingkat kemiskinan, dan IPM. Seluruh variabel digunakan dalam bentuk data tingkat (*level*), bukan transformasi logaritma, dengan pertimbangan bahwa satuan persentase (kemiskinan) dan indeks komposit (IPM) tidak selalu tepat *ditransformasi log*, serta agar interpretasi koefisien tetap dalam satuan asli yang mudah dibaca oleh pengambil kebijakan daerah.

PDRB per kapita dalam penelitian ini menggunakan basis harga konstan tahun dasar 2010, sehingga angka yang dianalisis telah bersih dari pengaruh inflasi dan mencerminkan perubahan volume riil output per penduduk. Belanja modal diukur dari realisasi total per kabupaten/kota per tahun.

Model regresi data panel dirumuskan sebagai berikut: $PDRBPK_{it} = \alpha + \beta_1 BM_{it} + \beta_2 KMS_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \epsilon_{it}$. PDRBPK menunjukkan PDRB per kapita, BM menunjukkan belanja modal, KMS menunjukkan kemiskinan, IPM menunjukkan Indeks

Pembangunan Manusia, i menunjukkan kabupaten/kota, t menunjukkan tahun, dan ε menunjukkan *error term*.

Model regresi ini menggunakan tiga variabel independen dan berpotensi rentan terhadap bias variabel terlewatkan (*omitted variable bias*), mengingat PDRB per kapita secara *teoritis* juga dipengaruhi oleh investasi swasta, tenaga kerja, struktur sektoral, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan harga komoditas. Ketiga variabel independen dipilih secara sengaja karena merupakan instrumen kebijakan yang paling dekat dengan kewenangan langsung pemerintah kabupaten/kota (belanja modal) serta dua indikator sosial yang menjadi sasaran utama evaluasi pembangunan daerah (kemiskinan dan IPM), sesuai dengan fokus artikel pada hubungan fiskal sosial, bukan pada model pertumbuhan ekonomi yang komprehensif. Karena keterbatasan ini, Pemilihan model dilakukan melalui uji spesifikasi data panel yang lazim digunakan dalam ekonometrika panel, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*, yang dibandingkan melalui uji *Chow (CEM vs FEM)* dan uji *Hausman (FEM vs REM)* (Baltagi, 2021; Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2010). Sebelum *interpretasi* hasil estimasi, penelitian ini juga melakukan pengujian asumsi klasik pada model terpilih, mencakup uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas; hasil kedua uji tersebut disajikan pada bagian Hasil dan Pembahasan bersama hasil estimasi utama.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

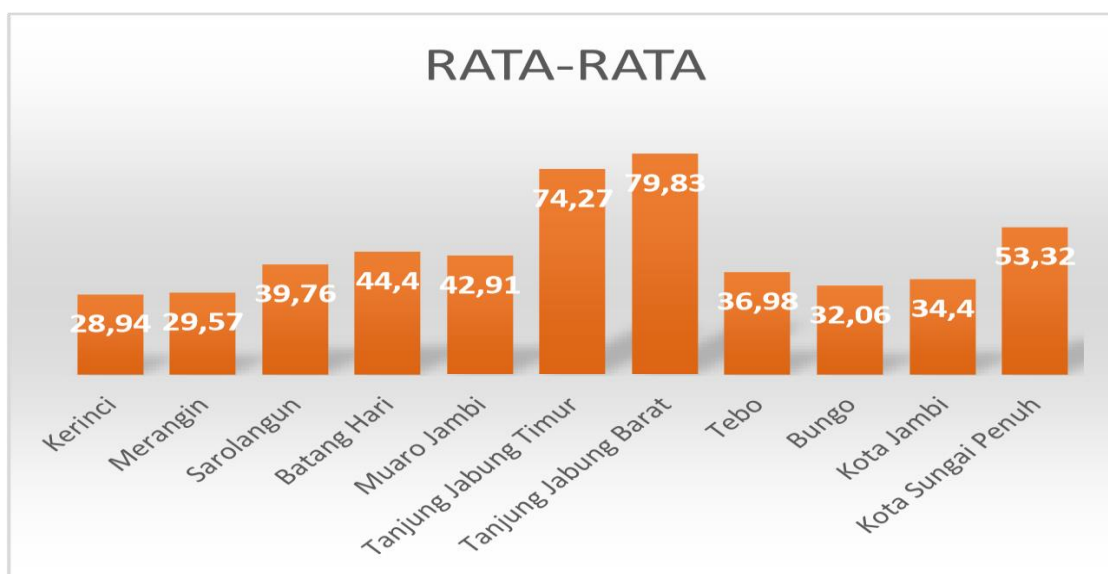
Variabel	Posisi	Definisi Operasional	Satuan	Sumber Data
PDRB per kapita	<i>Dependen</i>	Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun; indikator <i>outcome</i> ekonomi daerah.	Rupiah per kapita, harga konstan tahun dasar 2010	BPS Provinsi Jambi
Belanja modal	<i>Independen</i>	Realisasi belanja pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap dan infrastruktur.	Miliar rupiah, realisasi total per kabupaten/kota per tahun	DJPB Kementerian Keuangan
Kemiskinan	<i>Independen</i>	Persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan (<i>basic needs approach</i>).	Persen penduduk	BPS Provinsi Jambi
IPM	<i>Independen</i>	Indeks komposit pembangunan manusia mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.	Indeks (0–100)	BPS Provinsi Jambi

Sumber: Diolah penulis, 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Data

Sebelum dilakukan analisis regresi data panel, terlebih dahulu disajikan analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi masing-masing variabel penelitian pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2017–2024. Analisis ini bertujuan menunjukkan adanya variasi karakteristik antarwilayah sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai kondisi ekonomi daerah yang menjadi objek penelitian. Variasi tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)*.

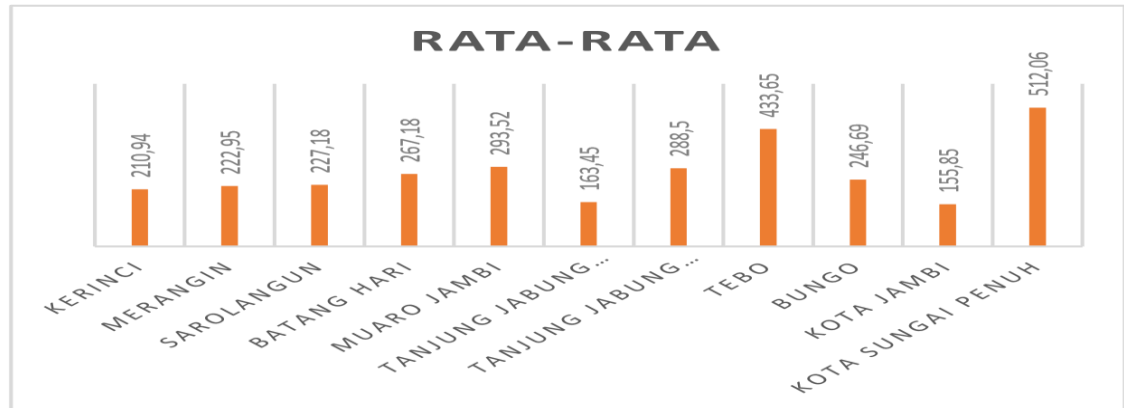


Sumber: Diolah penulis 2026

Gambar 1. Rata-rata PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017–2024 (*Juta Rupiah per Kapita*)

Berdasarkan Gambar 1, rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan perbedaan yang cukup besar selama periode 2017–2024. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki rata-rata PDRB per kapita tertinggi sebesar 79,83 juta rupiah per kapita, diikuti Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 74,27 juta rupiah per kapita. Sebaliknya, Kabupaten Kerinci dan Merangin memiliki rata-rata PDRB per kapita terendah, masing-masing sebesar 28,94 juta rupiah dan 29,57 juta rupiah per kapita. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya heterogenitas tingkat aktivitas ekonomi antarwilayah di Provinsi Jambi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masing-masing kabupaten/kota memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda sehingga penggunaan model *Fixed Effect Model (FEM)* menjadi tepat untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik tersebut dalam analisis. Hasil deskriptif ini juga sejalan dengan

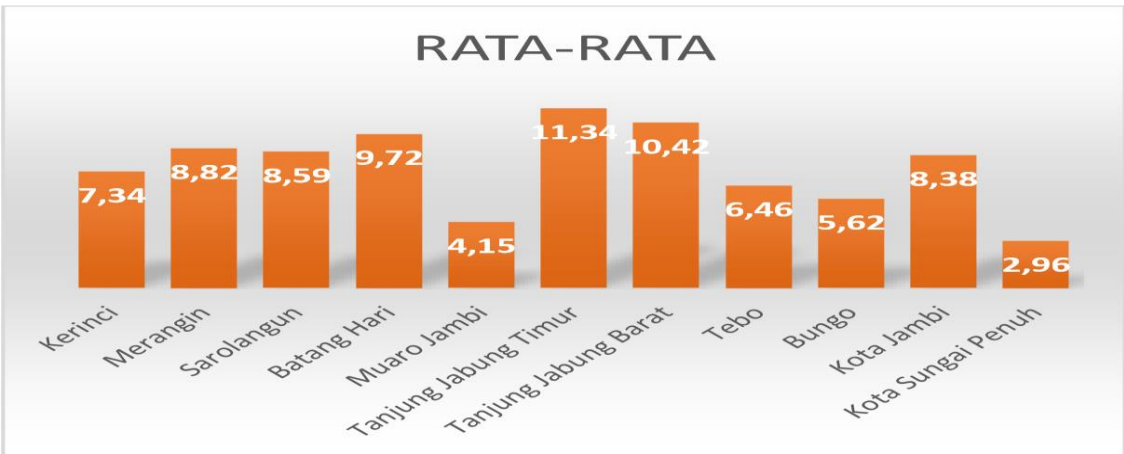
pembahasan mengenai heterogenitas struktural antarwilayah pada hasil estimasi regresi.



Sumber: Diolah penulis 2026

Gambar 2. Rata-rata Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017–2024 (Miliar Rupiah)

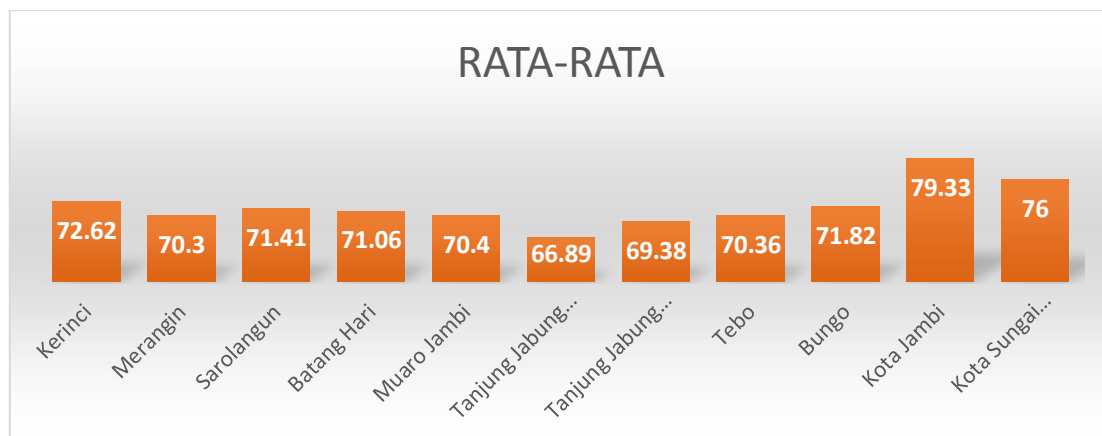
Gambar 2 menunjukkan bahwa rata-rata realisasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2017–2024 juga bervariasi. Kota Sungai Penuh mencatat rata-rata belanja modal terbesar, yaitu sekitar 512,06 miliar rupiah, diikuti oleh Kabupaten Tebo sebesar 433,65 miliar rupiah. Sebaliknya, Kota Jambi memiliki rata-rata belanja modal terendah sebesar 155,85 miliar rupiah, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 163,45 miliar rupiah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal maupun prioritas pembangunan antar pemerintah daerah tidak seragam. Namun demikian, besarnya belanja modal belum tentu diikuti oleh tingginya PDRB per kapita. Oleh karena itu, diperlukan analisis regresi data panel untuk mengetahui apakah belanja modal benar-benar berpengaruh terhadap PDRB per kapita secara statistik.



Sumber: Diolah penulis 2026

Gambar 3. Rata-rata Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017–2024 (Persen)

Berdasarkan Gambar 3, tingkat kemiskinan rata-rata pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2017–2024 menunjukkan variasi yang cukup besar. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 11,34 persen, diikuti oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 10,42 persen dan Kabupaten Batang Hari sebesar 9,72 persen. Sebaliknya, Kota Sungai Penuh memiliki rata-rata tingkat kemiskinan terendah sebesar 2,96 persen, disusul Kabupaten Muaro Jambi sebesar 4,15 persen dan Kabupaten Bungo sebesar 5,62 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat antarwilayah di Provinsi Jambi masih beragam. Meskipun demikian, variasi tingkat kemiskinan tersebut belum dapat secara langsung menggambarkan pengaruhnya terhadap PDRB per kapita sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut melalui regresi data panel.



Sumber: Diolah penulis 2026

Gambar 4. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017–2024 (*Indeks*)

Berdasarkan Gambar 4, rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2017–2024 menunjukkan adanya perbedaan antarwilayah. Kota Jambi memiliki rata-rata IPM tertinggi, yaitu sebesar 79,33, kemudian diikuti oleh Kota Sungai Penuh sebesar 76,00. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut memiliki capaian pembangunan manusia yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Di sisi lain, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki rata-rata IPM terendah, yaitu 66,89, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki rata-rata sebesar 69,38. Sementara itu, kabupaten lainnya berada pada kisaran 70 hingga 72, yang menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi relatif tidak berbeda jauh.

Perbedaan nilai IPM tersebut mencerminkan adanya variasi kualitas sumber daya manusia antar kabupaten/kota. Daerah dengan nilai IPM yang lebih tinggi umumnya memiliki capaian yang lebih baik pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Sebaliknya, daerah dengan nilai IPM yang lebih rendah masih memerlukan peningkatan pada ketiga aspek tersebut agar kualitas pembangunan manusianya dapat meningkat. Gambaran ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Jambi belum berlangsung secara merata di seluruh wilayah, sehingga masih diperlukan upaya untuk mengurangi kesenjangan antar daerah.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model dilakukan secara bertahap. *Uji Chow* menghasilkan nilai *Cross-section Chi-square* sebesar 87,260001 dengan probabilitas 0,0000 (lebih kecil dari 0,05), sehingga *Fixed Effect Model (FEM)* lebih tepat dibandingkan *Common Effect Model*. *Uji Hausman* selanjutnya menghasilkan nilai *Chi square cross section random* sebesar 7,934263 dengan probabilitas 0,0474 (lebih kecil dari 0,05), sehingga *Fixed Effect Model* juga lebih tepat dibandingkan *Random Effect Model*. Karena *uji Chow* telah menetapkan *FEM* di atas *CEM*, *uji Lagrange Multiplier* (yang membandingkan *CEM* dengan *REM*) tidak lagi diperlukan pada tahapan ini sesuai prosedur baku pemilihan model data panel. Dengan demikian, model akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Tabel 3. Ringkasan Pemilihan Model Data Panel

Pengujian	Perbandingan Model	Hasil Utama	Model Terpilih
Uji Chow	CEM vs FEM	<i>Cross-section Chi-square</i> = 87,260001; <i>Prob.</i> = 0,0000	FEM
Uji Hausman	FEM vs REM	<i>Chi-square cross-section random</i> = 7,934263; <i>Prob.</i> = 0,0474	FEM
Kesimpulan	—	Kedua uji mengarah pada FEM	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: Diolah penulis, 2026

Uji Asumsi Klasik dan Diagnostik Panel

Uji multikolinearitas dilakukan melalui matriks korelasi antar variabel *independen*. Hasil pengujian menunjukkan *koefisien korelasi* antara belanja modal dan kemiskinan sebesar -0,566931, antara belanja modal dan IPM sebesar -0,154753, serta antara kemiskinan dan IPM sebesar 0,020595. Karena seluruh nilai koefisien

korelasi berada di bawah ambang batas 0,85, model penelitian ini dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas yang serius.

Tabel 3a. Hasil Uji Multikolinearitas (Matriks Korelasi)

Variabel	Belanja Modal	Kemiskinan	IPM
Belanja Modal	1,000000	-0,566931	-0,154753
Kemiskinan	-0,566931	1,000000	0,020595
IPM	-0,154753	0,020595	1,000000

Sumber: Diolah penulis, 2026

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser*, yaitu meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas seluruh variabel (konstanta 0,3416; belanja modal 0,1871; kemiskinan 0,4556; IPM 0,6247) berada di atas 0,05, sehingga model dinyatakan bebas dari masalah *heteroskedastisitas* atau memenuhi asumsi *homoskedastisitas*.

Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Hasil estimasi menunjukkan pola yang menarik: secara simultan, belanja modal, kemiskinan, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita, tetapi secara parsial ketiga variabel tersebut tidak signifikan. Belanja modal memiliki koefisien negatif sebesar -0,007354 dengan probabilitas 0,9353, arah yang berlawanan dengan H_1 meskipun secara statistik tidak signifikan. Kemiskinan memiliki *koefisien negatif* sebesar -936,0622 dengan probabilitas 0,7573 arah ini konsisten dengan H_2 yang memprediksi pengaruh negatif, walau tidak signifikan secara statistik. IPM memiliki koefisien positif sebesar 0,235438 dengan probabilitas 0,6815, arah yang konsisten dengan H_3 , juga tidak signifikan. Secara simultan, nilai *F-statistic* sebesar 7,951229 (lebih besar dari *F-tabel* 2,71 pada $df_1=3$, $df_2=84$) dengan *Prob. (F-statistic)* sebesar 0,000000 menunjukkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita. Nilai *R-squared* sebesar 0,703572 (*Adjusted R-squared* 0,615086) menunjukkan bahwa model menjelaskan 70,36 persen variasi PDRB per kapita daya jelaskan yang tinggi untuk ukuran *studi regional*. Kombinasi hasil ini penting untuk dibaca secara cermat: *signifikansi simultan* dan *R-squared* yang tinggi pada *Fixed Effect Model* sebagian besar berasal dari efek tetap individu (*dummy*) 11 kabupaten/kota yang menangkap *heterogenitas struktural* antar wilayah, bukan dari *kontribusi* tahunan ketiga variabel kebijakan itu sendiri yang justru

tidak signifikan secara parsial. Interpretasi ini diuraikan lebih lanjut pada sub bagian Makna *Operasional Fiscal social decoupling*.

Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi Data Panel Model *Fixed Effect*

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob.	Keterangan
Konstanta	13875,47	0,575655	0,5668	Tidak signifikan
Belanja Modal	-0,007354	-0,081470	0,9353	Tidak signifikan parsial, arah berlawanan H ₁
Kemiskinan	-936,0622	-0,310247	0,7573	Tidak signifikan parsial, arah sesuai H ₂
IPM	0,235438	0,412156	0,6815	Tidak signifikan parsial, arah sesuai H ₃
R-squared	0,703572	—	—	Daya jelaskan tinggi (Adj. R ² = 0,615086)
Prob. F-statistic	0,000000	—	—	Signifikan simultan (F = 7,951229)

Sumber: Diolah penulis, 2026

Heterogenitas Struktural Antar wilayah (Efek Individu FEM)

Estimasi Fixed Effect Model menghasilkan nilai *intersep* (efek individu) yang berbeda-beda untuk setiap kabupaten/kota, yang merepresentasikan karakteristik struktural masing-masing wilayah yang tidak berubah sepanjang waktu. Nilai *intersep* akhir tertinggi terdapat pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat (30.231,61), diikuti Kabupaten Batang Hari (20.966,42) dan Tanjung Jabung Timur (19.644,35); nilai terendah terdapat pada Kabupaten Tebo (9.233,44) dan Kabupaten Kerinci (9.690,62). Variasi yang lebar ini dengan selisih *intersep* tertinggi dan terendah mencapai lebih dari tiga kali lipat mengindikasikan bahwa karakteristik struktural tetap tiap wilayah, seperti basis sektor perkebunan sawit dan pertambangan/migas di Tanjung Jabung Barat, memberi kontribusi dasar yang jauh lebih besar terhadap PDRB per kapita dibandingkan pengaruh tahunan belanja modal, kemiskinan, dan IPM. Temuan ini memperkuat argumen bahwa daya jelaskan model (*R-squared* = 70,36 persen) terutama berasal dari perbedaan struktural antarwilayah, bukan dari dinamika kebijakan fiskal sosial tahunan.

Paradoks Efektivitas Belanja Modal

Belanja modal yang tidak signifikan secara parsial bahkan dengan arah koefisien negatif (-0,007354) memperkuat gagasan paradoks efektivitas belanja modal. Secara teori, belanja modal seharusnya meningkatkan PDRB per kapita melalui

infrastruktur dan aset produktif. Namun, hasil empiris menunjukkan bahwa variasi tahunan belanja modal belum cukup kuat menjelaskan perubahan PDRB per kapita kabupaten/kota di Jambi setelah karakteristik struktural tiap wilayah dikendalikan melalui efek tetap. Temuan ini tidak serta merta berarti belanja modal tidak penting, tetapi menunjukkan bahwa kualitas, komposisi, dan keterhubungan belanja modal dengan sektor produktif perlu ditinjau lebih dalam. Sebagai ilustrasi, belanja modal kabupaten/kota di Jambi umumnya mencakup jenis-jenis berikut: infrastruktur jalan dan jembatan, gedung dan fasilitas administrasi pemerintahan, sarana pendidikan dan kesehatan, irigasi pertanian, pasar rakyat, serta fasilitas pelayanan publik lainnya. Sebagian besar pos ini bersifat infrastruktur dasar atau administratif yang penting bagi pelayanan publik, tetapi tidak seluruhnya secara langsung memperbesar nilai tambah sektor produktif seperti hilirisasi komoditas, konektivitas logistik ke sentra produksi, atau kawasan usaha produktif sehingga potensi keterputusannya dengan PDRB per kapita secara empiris menjadi lebih dapat dipahami. Sebagai perbandingan, Kota Sungai Penuh mencatat rata-rata belanja modal tertinggi (512,06 miliar rupiah), diikuti Tebo (433,65 miliar rupiah), sementara Kota Jambi mencatat rata-rata terendah (155,85 miliar rupiah) namun variasi besaran belanja modal ini tidak berbanding lurus dengan posisi PDRB per kapita maupun dengan efek individu *FEM* pada tabel sebelumnya, yang justru dipimpin oleh Tanjung Jabung Barat.

Ada beberapa mekanisme yang dapat menjelaskan paradoks ini. Pertama, belanja modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan penelitian menggunakan periode tahunan sehingga dampak infrastruktur mungkin belum muncul pada tahun yang sama; penelitian lanjutan dengan lag belanja modal berpotensi menangkap efek ini secara lebih tepat. Kedua, sebagian belanja modal berpotensi masih berorientasi pada infrastruktur administratif atau pelayanan dasar, bukan infrastruktur produktif yang langsung memperbesar nilai tambah. Ketiga, struktur ekonomi Jambi yang bertumpu pada komoditas primer dapat membuat PDRB per kapita lebih responsif terhadap harga komoditas, produksi perkebunan, pertambangan, dan investasi swasta dari pada realisasi belanja modal pemerintah daerah.

Dalam perspektif kebijakan, temuan ini menggeser ukuran keberhasilan belanja modal dari input menuju *outcome*. Realisasi anggaran yang tinggi belum memadai apabila tidak menghasilkan penurunan biaya logistik, peningkatan akses pasar, nilai tambah sektor unggulan, serapan tenaga kerja, dan kenaikan pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu, evaluasi belanja modal perlu memasukkan indikator manfaat ekonomi, bukan hanya indikator serapan anggaran.

Kemiskinan dan Keterbatasan Daya Serap Ekonomi

Kemiskinan yang tidak signifikan secara parsial (*koefisien* -936,0622; *Prob.* 0,7573) menunjukkan bahwa variasi tahunan tingkat kemiskinan belum menjadi penjelas utama variasi PDRB per kapita selama periode penelitian, meskipun arah negatifnya konsisten dengan teori. Secara deskriptif, rata-rata tingkat kemiskinan 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2017–2024 menunjukkan variasi antarwilayah yang cukup lebar: Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat rata-rata kemiskinan tertinggi (11,34 persen), diikuti Tanjung Jabung Barat (10,42 persen) dan Batang Hari (9,72 persen); sementara Kota Sungai Penuh mencatat rata-rata kemiskinan terendah (2,96 persen), diikuti Muaro Jambi (4,15 persen) dan Bungo (5,62 persen). Menariknya, Tanjung Jabung Barat berada pada kelompok kemiskinan tertinggi kedua sekaligus memiliki efek individu *FEM* tertinggi pada Tabel *Heterogenitas Struktural* pola ini konsisten dengan argumen bahwa PDRB per kapita di wilayah berbasis sumber daya alam dapat tinggi tanpa diikuti pemerataan kesejahteraan yang sepadan bagi penduduk miskinnya. Variasi antar wilayah ini penting karena kondisi ini dapat terjadi ketika PDRB per kapita banyak dipengaruhi sektor padat modal atau sektor berbasis sumber daya alam yang tidak memiliki efek distribusi kuat kepada rumah tangga miskin. Dengan kata lain, pertumbuhan output dapat terjadi tanpa peningkatan partisipasi ekonomi kelompok miskin secara memadai.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa program pengurangan kemiskinan perlu dibedakan antara program konsumtif dan produktif. Bantuan sosial dapat menurunkan kerentanan jangka pendek, tetapi belum tentu meningkatkan produktivitas dan PDRB per kapita apabila tidak diikuti pelatihan kerja, akses modal, pendampingan UMKM, dan koneksi dengan pasar. Karena itu, kemiskinan harus ditempatkan sebagai isu produktivitas dan akses ekonomi, bukan hanya isu bantuan sosial.

IPM dan Jeda antara Kapabilitas Manusia dan Output Ekonomi

IPM yang tidak signifikan secara parsial (*koefisien* 0,235438; *Prob.* 0,6815) tidak berarti pembangunan manusia tidak penting; arah koefisiennya tetap positif, sesuai H_3 , meskipun tidak signifikan secara statistik. Secara deskriptif, nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Jambi berada pada kisaran 66 hingga 79, dengan Kota Jambi mencatat rata-rata IPM tertinggi (79,33) sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi dengan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang lebih luas. Temuan tidak signifikan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas manusia belum otomatis terkonversi menjadi peningkatan PDRB per kapita dalam

horizon tahunan penelitian. Dampak pendidikan dan kesehatan terhadap produktivitas biasanya membutuhkan waktu, serta memerlukan pasar kerja yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik. Jika struktur ekonomi masih didominasi sektor primer dengan nilai tambah rendah, peningkatan IPM dapat mengalami jarak dengan peningkatan output ekonomi. Sebagai agenda penelitian lanjutan, penggunaan IPM dengan struktur lag (mis. IPM tahun $t-1$ atau $t-2$ terhadap PDRB perkapita tahun t) berpotensi menangkap jeda konversi kapabilitas manusia menjadi output ekonomi secara lebih akurat dibandingkan struktur data level pada penelitian ini.

Hasil ini memperkuat argumentasi bahwa pembangunan manusia harus dihubungkan dengan strategi transformasi ekonomi. Peningkatan rata-rata lama sekolah, kesehatan, dan standar hidup perlu disertai pengembangan industri pengolahan, jasa produktif, digitalisasi ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Tanpa koneksi tersebut, IPM berpotensi menjadi indikator sosial yang membaik, tetapi belum menghasilkan dorongan ekonomi yang terukur pada PDRB per kapita.

Makna Operasional *Fiscal Social Decoupling*

Hasil estimasi *FEM* pada penelitian ini menunjukkan pola yang secara khusus mendukung gagasan *Fiscal social decoupling*, meskipun dalam bentuk yang berbeda dari model dengan daya jelaskan rendah pada umumnya. *Model Fixed Effect Model* penelitian ini justru signifikan secara simultan dan berdaya jelaskan tinggi ($R\text{-squared} = 0,703572$), tetapi kekuatan penjelas tersebut tidak berasal dari ketiga variabel fiskal-sosial yang menjadi fokus kebijakan (belanja modal, kemiskinan, IPM), yang seluruhnya tidak signifikan secara parsial. Agar klaim ini tidak berhenti pada tafsir kualitatif, penelitian ini merumuskan empat indikator minimum yang harus terpenuhi secara bersamaan sebelum suatu hasil regresi dapat dibaca sebagai indikasi *Fiscal-social decoupling* versi *FEM*, yaitu: (1) koefisien belanja modal tidak signifikan secara parsial; (2) koefisien kemiskinan tidak signifikan secara parsial; (3) koefisien IPM tidak signifikan secara parsial; dan (4) model keseluruhan tetap signifikan secara simultan dengan $R\text{-squared}$ tinggi yang terutama dijelaskan oleh efek tetap individu antarwilayah, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel *Heterogenitas Struktural* Antar wilayah. Keempat kondisi ini seluruhnya terpenuhi pada Tabel 4, sehingga penggunaan istilah *Fiscal social decoupling* dalam artikel ini memiliki dasar operasional yang eksplisit: bukan model yang gagal menjelaskan PDRB per kapita, melainkan model yang menjelaskan PDRB per kapita terutama melalui karakteristik struktural

tetap tiap wilayah, bukan melalui instrumen fiskal sosial tahunan yang menjadi objek kebijakan.

Fiscal social decoupling dalam pengertian ini bukan dimaksudkan sebagai istilah statistik semata, tetapi sebagai kerangka kebijakan. Istilah ini menjelaskan situasi ketika belanja pembangunan dan indikator sosial bergerak dari tahun ke tahun, tetapi variasi tahunan tersebut belum cukup terkoneksi dengan *outcome* ekonomi sementara variasi antarwilayah yang bersifat struktural (basis sektor, *endowment* sumber daya alam, posisi geografis) justru menjelaskan sebagian besar perbedaan PDRB per kapita. Kondisi tersebut dapat muncul karena infrastruktur tidak terhubung dengan rantai nilai lokal, program kemiskinan tidak meningkatkan produktivitas, dan peningkatan IPM tidak diserap oleh pasar kerja produktif, sementara keunggulan struktural wilayah (seperti basis perkebunan dan pertambangan di Tanjung Jabung Barat) tetap dominan dari tahun ke tahun. Perlu ditegaskan bahwa klaim *decoupling* ini bersifat sebagai *hipotesis* kebijakan yang didukung pola data, bukan kesimpulan kausal definitif, dan memerlukan pengujian lebih lanjut dengan model yang memasukkan variabel kontrol tambahan sebagaimana diuraikan pada bagian Keterbatasan Penelitian. Dengan demikian, kontribusi artikel ini adalah menawarkan cara membaca ketidaksignifikan parsial di tengah model simultan yang kuat sebagai tanda perlunya perbaikan desain kebijakan daerah, bukan mengklaim kepastian mekanisme kausalnya.

Tabel 5. Penguatan *Novelty* Berdasarkan Hasil Penelitian

Temuan	Makna Empiris	Bukti Empiris / Dasar Hasil Regresi	Implikasi Kebijakan
Belanja modal tidak signifikan parsial	Belanja pembangunan tahunan belum otomatis menjadi <i>outcome</i> ekonomi.	<i>Koefisien</i> -0,007354; <i>Prob.</i> 0,9353 (<i>Tabel 4</i>)	Perlu evaluasi kualitas dan orientasi belanja modal.
Kemiskinan tidak signifikan parsial	Penurunan kemiskinan tahunan belum cukup menjelaskan PDRB per kapita, meski arah sesuai teori.	<i>Koefisien</i> -936,0622; <i>Prob.</i> 0,7573 (<i>Tabel 4</i>)	Program kemiskinan harus dikaitkan dengan produktivitas dan akses pasar.
IPM tidak signifikan parsial	Kapabilitas manusia belum langsung menjadi <i>output</i> ekonomi tahunan, meski arah sesuai teori.	<i>Koefisien</i> 0,235438; <i>Prob.</i> 0,6815 (<i>Tabel 4</i>)	IPM perlu dihubungkan dengan pasar kerja dan transformasi ekonomi.
$R^2 = 0,703572$ tetapi didominasi efek tetap wilayah	Daya jelaskan tinggi model berasal dari heterogenitas struktural antarwilayah, bukan variabel kebijakan tahunan.	<i>Prob.</i> F -statistic 0,000000; efek individu <i>FEM tertinggi di Tanjung Jabung Barat (Tabel 4 dan Heterogenitas Struktural)</i>	Perlu variabel struktur ekonomi, investasi, komoditas, tenaga kerja, dan lag belanja untuk memisahkan efek struktural dan kebijakan.

Sumber: Diolah penulis, 2026

Implikasi Kebijakan untuk Pemerintah Daerah

Temuan penelitian mengarah pada kebutuhan reorientasi belanja modal berbasis *outcome*. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa belanja modal diarahkan pada infrastruktur yang mempunyai keterkaitan langsung dengan sektor unggulan dan rantai nilai lokal misalnya jalan produksi menuju sentra perkebunan sawit dan karet, fasilitas hilirisasi komoditas, pasar agroindustri, kawasan logistik komoditas pertambangan dan pertanian, serta infrastruktur digitalisasi UMKM. Infrastruktur jalan, irigasi, pasar, kawasan produksi, fasilitas logistik, dan infrastruktur digital perlu dirancang untuk memperbesar nilai tambah, bukan hanya memperlancar mobilitas komoditas mentah keluar daerah.

Pemerintah daerah juga perlu mengintegrasikan belanja modal dengan agenda pengurangan kemiskinan dan peningkatan IPM. Pembangunan infrastruktur akan lebih efektif apabila disertai pelatihan kerja, pendampingan UMKM, hilirisasi komoditas, akses pembiayaan, dan penciptaan lapangan kerja lokal. Dengan demikian, belanja modal tidak berdiri sebagai proyek fisik, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan inklusif yang menghubungkan aset publik, kapabilitas manusia, dan aktivitas ekonomi produktif.

Selain itu, evaluasi APBD perlu menggunakan indikator manfaat ekonomi. Pemerintah daerah dapat menilai belanja modal melalui indikator penurunan biaya distribusi, peningkatan volume produksi, jumlah usaha yang terhubung dengan infrastruktur, serapan tenaga kerja, pertumbuhan sektor unggulan, dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar proyek. Pendekatan ini penting agar belanja modal tidak berhenti pada logika serapan, tetapi bergerak menuju logika manfaat.

Tabel 6. Agenda Reorientasi Kebijakan Berdasarkan Temuan Penelitian

Aspek	Orientasi Lama	Orientasi yang Disarankan	Indikator Evaluasi
Perencanaan belanja modal	Berbasis kebutuhan fisik dan serapan anggaran	Berbasis <i>outcome</i> ekonomi dan rantai nilai lokal	Biaya logistik turun; volume produksi naik
Infrastruktur	Jalan/gedung/fasilitas umum yang belum tentu produktif	Infrastruktur produksi, logistik, pasar, kawasan UMKM, dan digital	UMKM terkoneksi pasar; serapan tenaga kerja
Kemiskinan	Bantuan sosial dan perlindungan jangka pendek	Pemberdayaan produktif, pelatihan, akses pembiayaan, dan pasar	Pendapatan masyarakat meningkat
IPM	Pendidikan dan kesehatan sebagai program sektoral	Kapabilitas manusia dikaitkan dengan kebutuhan sektor unggulan	Serapan tenaga kerja terdidik pada sektor unggulan

Evaluasi APBD	Realisasi anggaran	Produktivitas, nilai tambah, serapan kerja, dan pendapatan masyarakat	Kombinasi indikator pada kolom kiri, dilaporkan tahunan
----------------------	--------------------	---	---

Sumber: Diolah penulis, 2026

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja modal, kemiskinan, dan IPM tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2017–2024, meskipun secara simultan ketiganya berpengaruh signifikan. Model akhir yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*, dipilih melalui *uji Chow* (*Prob.* = 0,0000) dan *uji Hausman* (*Prob.* = 0,0474). Hasil simultan dengan *Prob.* (*F-statistic*) sebesar 0,000000 dan *R-squared* sebesar 0,703572 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan menjelaskan variasi PDRB per kapita dengan kuat, tetapi kekuatan penjelas tersebut terutama berasal dari efek tetap struktural antarwilayah (Tabel *Heterogenitas Struktural*), bukan dari kontribusi tahunan ketiga variabel fiskal sosial itu sendiri.

Temuan tersebut memperkuat *novelty* penelitian mengenai paradoks efektivitas belanja modal dan *Fiscal social decoupling*, yang dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui pola ketidaksignifikanan parsial ketiga variabel di tengah model simultan yang signifikan dan berdaya jelaskan tinggi. Belanja modal belum otomatis meningkatkan PDRB per kapita apabila kualitas alokasi, keterhubungan dengan sektor produktif, dan orientasi *outcome* belum kuat. Kemiskinan dan IPM juga belum langsung berkonversi menjadi *outcome* ekonomi tahunan karena manfaat sosial membutuhkan koneksi dengan produktivitas, pasar kerja, dan transformasi struktur ekonomi, sementara karakteristik struktural tetap wilayah seperti basis sektor perkebunan dan pertambangan di Tanjung Jabung Barat tampak lebih dominan dalam menjelaskan tingkat PDRB per kapita. Temuan ini perlu dibaca dalam keterbatasan model yang belum memasukkan variabel struktural ekonomi eksplisit, investasi swasta, harga komoditas, dan lag belanja modal, sehingga klaim *decoupling* dalam artikel ini bersifat sebagai hipotesis kebijakan awal yang didukung pola data, bukan kesimpulan kausal yang final.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi perhatian pembaca. Pertama, model hanya menggunakan tiga variabel independen sehingga rentan terhadap bias variabel terlewatkan; variabel struktural seperti investasi swasta,

tenaga kerja, PAD, dana transfer, dan harga komoditas belum dimasukkan secara eksplisit sebagai variabel kontrol, padahal diduga kuat menjadi sumber utama daya jelaskan model melalui efek tetap wilayah. Kedua, uji autokorelasi dan uji *cross sectional dependence* belum dilakukan pada model ini, sehingga validitas *standard error* pada Tabel 4 masih perlu diperkuat dengan kedua uji tersebut, mengingat 11 kabupaten/kota dalam sampel saling berdekatan secara geografis dan ekonomi. Ketiga, penggunaan data level tahunan tanpa *struktur lag* berpotensi belum menangkap efek jangka panjang belanja modal dan IPM terhadap PDRB per kapita. Keempat, penelitian ini belum menyertakan variabel harga komoditas global yang secara teoretis relevan bagi struktur ekonomi Jambi yang berbasis sumber daya alam. Kelima, klaim *Fiscal social decoupling* dalam penelitian ini bersifat *interpretatif* berdasarkan pola hasil regresi (ketidaksignifikanan parsial di tengah model simultan yang kuat) dan belum diuji secara langsung melalui model mediasi atau *structural equation modeling* yang dapat mengonfirmasi mekanisme keterputusan secara lebih ketat. Keenam, satuan belanja modal pada berkas data sumber tercatat tidak konsisten (juta rupiah pada satu bagian, miliar rupiah pada bagian lain) sehingga perlu diverifikasi ulang terhadap *output E-views* asli sebelum naskah ini disubmit ke jurnal.

Saran

Saran utama penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi perlu menggeser belanja modal dari pendekatan input menuju pendekatan *outcome*. Belanja modal perlu diprioritaskan pada infrastruktur produktif yang mendukung sektor unggulan, hilirisasi komoditas, konektivitas pasar, UMKM, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Program pengurangan kemiskinan dan peningkatan IPM harus diintegrasikan dengan strategi ekonomi daerah agar pembangunan manusia dan perlindungan sosial benar-benar menghasilkan produktivitas.

Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel investasi swasta, tenaga kerja, struktur sektoral PDRB, PAD, dana transfer, harga komoditas, kualitas belanja modal, serta lag belanja modal. Penambahan variabel tersebut penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar variasi PDRB per kapita dijelaskan oleh faktor struktural di luar model. Penelitian kualitatif atau *mixed methods* juga dapat digunakan untuk menelusuri mekanisme *Fiscal social decoupling* secara lebih mendalam pada tingkat kabupaten/kota, termasuk memvalidasi keempat indikator minimum *decoupling* yang dirumuskan pada bagian Hasil dan Pembahasan melalui data primer dari perencanaan anggaran daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atas ketersediaan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BIODATA PENULIS

Nurfitri Martaliah dan Muhammad Ismail adalah dosen pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan fokus kajian ekonomi pembangunan dan kebijakan fiskal daerah.

Asti Harkeneni adalah Peneliti BRIDA Provinsi Jambi dengan fokus kajian ekonomi pembangunan dan kebijakan fiskal daerah.

Isma Wati adalah mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan fokus kajian belanja publik, kemiskinan, dan pembangunan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K., Fadhlurrahman, M., & Nasution, A. (2025). *Analysis of the influence of capital expenditure and human development index on per capita income: Evidence from city regency panel data in Aceh, Indonesia*. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(3), 245–256. <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i3.1233>
- Aprilianti, V. A., & Harkeneni, A. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 5(2), 1142–1160.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kemiskinan dan ketimpangan. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2024). Data produk domestik regional bruto, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Jambi. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. <https://jambi.bps.go.id/>
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6th ed.). Springer.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Portal data APBD: Data realisasi anggaran pemerintah daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.

- Harrod, R. F. (1939). *An essay in dynamic theory*. *The Economic Journal*, 49(193), 14–33.
- Hung, N. T., & Thanh, S. D. (2022). *Fiscal decentralization, economic growth, and human development: Empirical evidence*. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2109279. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2109279>
- Ihwandi, I., Harahap, N., & Nasution, M. A. (2023). *Regional financial performance and inclusive economic development: Empirical evidence from provinces in Indonesia*. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 15(2), 417–429. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.417-429>
- Jhingan, M. L. (2014). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Rajawali Pers.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Kuznets, S. (1955). *Economic growth and income inequality*. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Nurkse, R. (1953). *Problems of capital formation in underdeveloped countries*. Basil Blackwell.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Rahmadeni, R., & Nurjannah, N. (2022). Model tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Riau: Menggunakan regresi data panel. *KUBIK: Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika*, 6(2), 98–109. <https://doi.org/10.15575/kubik.v6i2.13598>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Siburian, M. E. (2020). *Fiscal decentralization and regional income inequality: Evidence from Indonesia*. *Applied Economics Letters*, 27(17), 1383–1386. <https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1683139>
- Sofilda, E., Zilal Hamzah, M., & Kusairi, S. (2023). *Analysis of fiscal decentralisation, human development, and regional economic growth in Indonesia*. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2220520. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220520>
- Solow, R. M. (1956). *A contribution to the theory of economic growth*. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Subekti, A. T. (2023). Analisis pengaruh inflasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 7(2), 1750–1763. <https://doi.org/10.37250/khazanah.v7i2.200>
- Tirtosuharto, D. (2021). *The impact of fiscal efficiency on poverty reduction in Indonesia: Institutional factor and geographical differences*. *Journal of*

Geographical Systems, 23(589. <https://doi.org/10.10074>), 567–/s10109-021-00359-1

- Umsohy, H., Latuconsina, Z. M. Y., & Sangadji, S. S. (2018). *The effect of capital allocations on economic growth, human development index and poverty in North Maluku of Indonesia during 2010–2016*. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 80(8), 11–18. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-08.02>
- United Nations Development Programme. (2024). *Human development report 2023/2024: Breaking the gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world*. United Nations Development Programme. <https://hdr.undp.org/>
- Utami, F. P. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Jurnal Samudra Ekonomika, 4(2), 101–113.
- Wau, Y. (2022). *Economic growth, human capital, public investment, and poverty in underdeveloped regions in Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 23(2), 234–248. <https://doi.org/10.18196/jesp.v23i2.15307>
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). MIT Press.